

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Identifikasi Masalah

Setiap daerah tentu mendambakan perekonomian yang maju dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan. Dimana kemajuan ekonomi dicerminkan melalui pertumbuhan ekonomi. Menurut Yulianita (2009) ada lima karakteristik yang dijadikan standar untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah yaitu, pertama dan terpenting harus ada sumber daya alam yang melimpah. Kedua, harus ada uang (modal) untuk mengelola sumber daya tersebut. Ketiga, harus ada bangunan dan infrastruktur untuk mendukung semua kegiatan. Keempat, harus ada teknologi yang memadai untuk mengelola sumber daya tersebut. Dan kelima, harus ada SDM yang mumpuni untuk mengelola teknologi tersebut. Pertumbuhan ekonomi dengan prosesnya yang berkesinambungan juga menjadi indikator yang esensial dalam perkembangan pembangunan suatu daerah. Proses peningkatan output komoditas dan jasa dalam usaha perekonomian masyarakat juga dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Ada yang berpendapat bahwa pertumbuhan berkaitan dengan pembangunan satu dimensi dan diukur dengan peningkatan pendapatan dan output produksi. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menunjukkan adanya peningkatan pendapatan suatu daerah.

Besaran nilai tambah bruto suatu daerah tak lepas oleh peranan sektor-sektor ekonomi terutama sektor basis (unggulan). Dimana sektor basis tersebut merupakan sektor penggerak yang mampu menyaingi sektor serupa di daerah lain. Pada era otonomi daerah fokus terhadap pertumbuhan ekonomi meningkat yang menyebabkan setiap daerah berlomba-lomba untuk memperkuat pondasi perekonomiannya salah satunya melalui pengoptimalan kegiatan ekonomi pada sektor-sektor unggulan. Selanjutnya dalam Nugroho,2004 (dalam Ruth Yuliani Hutabarat,2020) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat ditentukan oleh basis ekspor

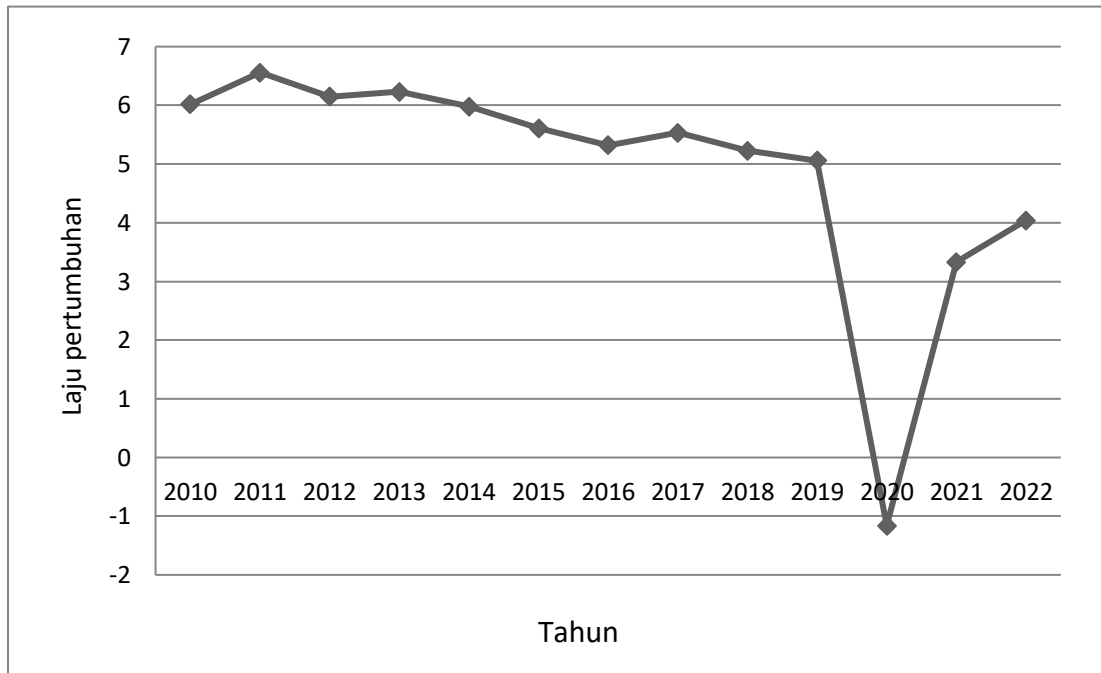
serta eksploitasi kemanfaatan alamiah di suatu daerah yang disebabkan oleh permintaan dari luar daerah. George H. Bort, 1960 (dalam Sjafrizal, 2008) juga menegaskan dalam gagasannya yaitu teori pertumbuhan ekonomi neoklasik bahwa daerah yang mampu mengembangkan kegiatan produksi melalui potensi daerah akan mempengaruhi perekonomian daerah yang bersangkutan. Sedangkan potensi daerah bukan satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan produksi suatu daerah, faktor lainnya termasuk perpindahan tenaga kerja dan modal antar daerah.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik pengelolaan dan perkembangan potensi daerah tetapi juga dalam pengoptimalan modal dalam menunjang berbagai kegiatan. Hal ini merujuk pada salah satu instrumen dari kebijakan fiskal yaitu pengeluaran pemerintah. Dimana dalam teori ekonomi Keynesian yang dipimpin oleh John Maynard Keynes percaya bahwa pengeluaran pemerintah memberikan efek besar pada kegiatan ekonomi. Kemudian WW Rostow dan RA Musgrave dalam gagasannya mengungkapkan bahwa proses pembangunan ekonomi suatu daerah dikaitkan dengan pengeluaran pemerintah yang tujuannya untuk merangsang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini diimplikasikan melalui investasi dan penyediaan infrastruktur. Salah satu instrumen kebijakan fiskal yaitu pengeluaran pemerintah merupakan suatu langkah yang bertujuan untuk mengatur jalannya perekonomian oleh pemerintah dengan menetapkan jumlah penerimaan dan pengeluaran setiap tahun yang termuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk tingkat nasional kemudian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tingkat regional. Tujuan dari kebijakan ini sendiri adalah untuk menstabilkan harga input, peluang kerja dan tentunya memacu pertumbuhan ekonomi.

Daerah yang dijadikan objek penelitian adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan satu dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dimana wilayah ini terletak di area yang menjadi penghubung dua Provinsi yaitu Riau dan Sumatera Barat. Karena berada pada jalur lintas provinsi, hal ini sangat menguntungkan bagi daerah ini karena bisa menjadi sebuah potensi dan juga peluang besar dalam perekonomian daerahnya (BPS Lima

Puluh Kota, 2015). Dilihat dari tren pertumbuhan ekonomi, kabupaten ini berada diposisi 10 diantara 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Berikut disajikan grafik tren laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2010-2022:

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2022.



Sumber : BPS Sumatera Bara,2010

Dari grafik tersebut terlihat jika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Dilihat dari tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,67% kemudian meningkat pada tahun 2011 dimana pertumbuhan ekonomi daerah ini mencapai 6,56% ,angka ini menjadikan Kabupaten Lima Puluh Kota salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Namun untuk tahun 2012 sampai 2016 terus mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari angka 6,15% menjadi 5,32%. Kemudian untuk tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 5,53% dan kembali turun menjadi 5,23% ditahun 2018 serta 5,06% tahun 2019. Terjadinya fluktuasi pada pertumbuhan ekonomi di daerah ini disebabkan karena penurunan produksi

disejumlah sektor dan adanya inflasi yang cukup tinggi. Tahun 2020 menjadi tahun terburuk Kabupaten ini, karena terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat drastis yaitu -1,16%. Dan untuk tahun 2021 dan 2022 adanya perbaikan distruktur ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi kembali naik yaitu sebesar 3,33% dan 4,02%. Perekonomian di daerah ini yang cenderung melemah setiap tahunnya disebabkan oleh banyaknya hambatan dan tantangan dalam pembangunan ekonomi daerah seperti potensi daerah yang pengelolaannya belum optimal yang terlihat pada setiap tahunnya. Selain itu masalah pada ketimpangan antara daerah dalam berbagai sektor disebabkan karena belum optimalnya kebijakan untuk mengatasi masalah pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah oleh pemerintah daerah. Sementara itu, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung pertumbuhan ekonomi masih terbatas dan juga kabupaten ini belum mampu memanfaatkan secara maksimal media yang ada sebagai katalis pembangunan dan pendorong pertumbuhan ekonomi riil di Kabupaten Lima Puluh Kota (BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, 2015).

Kabupaten Lima Puluh Kota selain unggul di segi geografisnya juga memiliki potensi alam yang melimpah terutama di sektor pertanian. Dilihat dari prospek produksi dan pemasarannya dilingkup domestik serta internasional komoditi gambir masih sangat menjanjikan. Dimana data Distanshorbun tahun 2019 mencatat produksi komoditi gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu 7.137.98 ton dengan luas lahan 17.521 ha. Dapat dikatakan 90% produksi gambir di Sumatera Barat berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota. Walaupun besarnya produksi gambir dan semakin luasnya lahan justru membawa dampak buruk kepada harga. Karena dinilai pasokan melimpah dan membuat eksportir dengan mudah menentukan harga. Selain itu permasalahan besar yang dihadapi yaitu rendahnya produktivitas dan kualitas produk akibat dari dukungan teknologi yang kurang memadai, praktik pertanian yang buruk serta belum optimalnya proses pasca panen (pengolahan). Hal ini mengakibatkan harga pasaran gambir menjadi rendah terutama ditahun 2017-2020. Contohnya harga gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai Rp.30.000 per kilogram, sedangkan

untuk dieskpor keluar daerah bisa turun sampai 50%. Tentu saja hal ini sangat merugikan perekonomian daerah terutama petani gambir yang mengantungkan hidupnya pada sektor ini. Oleh karena itu perlu campur tangan pemerintah dalam menstabilkan kembali produktivitas gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada masa otonomi daerah, setiap daerah diberi kebebasan dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri. Hal yang dilakukan setiap daerah adalah mengoptimalkan anggaran agar teralokasi dengan baik. Namun permasalahan keuangan yang dihadapi Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini adalah terdapat sejumlah pekerjaan dan kebutuhan pembangunan fisik yang sudah rampung dilaksanakan tetapi tidak bisa dibayarkan oleh pemerintah daerah. Sehingga mengakibatkan sejumlah anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mengalami pergeseran terhadap sejumlah belanja yang sebelumnya telah dirancang dan juga terdapat ratusan personil Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten dirumahkan guna untuk mengakali kondisi keuangan daerah yang dihadapi. Jika hal ini tidak segera diatasi tentu akan merambat ke berbagai sektor dan mempengaruhi perekonomian daerah itu sendiri.

Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa dalam usaha meningkatkan perekonomian daerah ada faktor yang berperan besar yaitu pemanfaatan potensi daerah melalui sektor ekonomi unggulan dan keseimbangan keuangan daerah melalui pengeluaran pemerintah daerah. Walaupun di Kabupaten Lima Puluh Kota potensi daerah belum optimal dimanfaatkan dan masalah anggaran keuangan yang belum teratasi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kedua faktor tersebut tetap berperan dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota. Oleh karena itu judul dari penelitian ini adalah **“Analisis Pengaruh Sektor Ekonomi Unggulan dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2022”**.

1.2 Perumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang maju merupakan tujuan setiap daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi terwujud oleh beberapa faktor seperti perkembangan sektor ekonomi atau produksi daerah serta peran pemerintah dalam bentuk kebijakan pengeluaran pemerintah yang proporsional. Kemudian berbagai pakar ekonomi juga mengungkapkan gagasannya bahwasanya sektor ekonomi dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pada bagian latar belakang dipaparkan juga bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota yang selalu mendapati fluktuasi setiap tahunnya.

Fokus dari studi ini adalah dengan melihat bagaimana sektor ekonomi unggulan dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dengan berbagai rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Apa saja sektor yang menjadi sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010 - 2022?
- 2) Bagaimana pengaruh sektor ekonomi unggulan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010-2022?
- 3) Bagaimana pengaruh dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010-2022?

1.3 Tujuan Umum Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menjabarkan tujuan umum penelitian yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengetahui dan menganalisis sektor apa saja yang menjadi sektor ekonomi unggulan dalam berbagai kategori di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2010-2022.
- 2) Mengidentifikasi pengaruh sektor ekonomi unggulan atas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010-2022.
- 3) Mengidentifikasi dampak pengeluaran atas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010-2022.